

## BAB VIII

### P E N U T U P

#### 8.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa ritual *hinting pali* di Kabupaten Kotawaringin Timur telah mengalami pergeseran pemaknaan dari fungsi spiritual-kultural menjadi instrumen strategis menghadapi tantangan global dan tekanan eksternal. Masyarakat lokal memaknai ritual *hinting pali* sebagai sarana menjaga keseimbangan kosmos, melindungi ruang hidup dan membangun solidaritas sosial. Dimana praktik adat tersebut menjelaskan bahwa hutan dan ruang hidup masyarakat tidak sekadar memiliki nilai ekonomi, tetapi terkandung makna spiritual dan politis. Oleh karena itu ritual *hinting pali* menjadi simbol identitas kolektif dan menjadi strategi masyarakat lokal (adat) mempertahankan eksistensi kultural dan hak atas sumber daya.

Pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* terjadi akibat adanya perubahan sosial, politik dan ekonomi di Kotawaringin Timur serta menjadi arena kontestasi kepentingan berbagai aktor seperti masyarakat lokal, pemangku adat, pemuka agama, korporasi maupun negara. Pergeseran pemaknaan tersebut merupakan dapat digambarkan sebagai bentuk simbol perlawanan terhadap ekspansi korporasi karena mengancam ruang hidup mereka. Tujuannya sebagai instrumen politik praktis untuk mendapatkan legitimasi, mendapatkan keuntungan secara ekonomi dan melakukan negosiasi dengan negara.

Pergeseran tersebut menjadi permasalahan sosial, politik dan ekonomi karena ekspansi perkebunan kelapa sawit dan tambang telah membatasi akses masyarakat lokal (adat) terhadap tanah, lingkungan, alam dan hutan sebagai

sumber penghidupan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut memicu perlawanan masyarakat lokal secara terbuka, karena kebijakan yang dibuat negara dianggap berpihak kepada korporasi dan menggunakan logika kapitalisme global. Namun karena adanya perbedaan orientasi ekonomi, kepentingan politik dan interpretasi terhadap nilai-nilai adat (*hinting pali*) pertarungan kepentingan antar kelompok masyarakat lokal terjadi fragmentasi.

Menggunakan pisau analisis konsep hegemoni Gramsci ritual *hinting pali* dapat disimpulkan menjadi arena perebutan konsensus, kepemimpinan moral, dan intelektual. Dimana elite adat, pemuka agama dan aktor politik memanfaatkan ritual tersebut bukan hanya sebagai penjaga tradisi, tetapi menjadi instrumen hegemonik untuk membentuk kesadaran masyarakat. Kelompok masyarakat yang menolak dominasi negara dan korporasi menggunakan ritual *hinting pali* sebagai simbol kontra hegemoni dan resistensi atas hak ruang hidup maupun identitas kolektif mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa ritual *hinting pali* mengalami pergeseran sebagai arena dan kontestasi perebutan kuasa untuk mendapatkan otoritas atas pengelolaan, penguasaan serta kepemilikan atas hutan, lingkungan, alam, lahan dan tanah.

Implikasi pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* berdampak secara sosial, politik dan ekonomi, secara sosial ritual tersebut menjadi simbol solidaritas kolektif. Namun perbedaan pemaknaan antar kelompok masyarakat menyebabkan terjadinya fragmentasi internal dan berpotensi menyebabkan munculnya konflik horizontal. Secara ekonomi pergeseran makna menciptakan ketimpangan ekonomi, dimana kelompok masyarakat yang berafiliasi dengan korporasi dan mendapat dukungan negara secara ekonomi relatif lebih sejahtera. Sebaliknya

kelompok masyarakat yang tidak berafiliasi dengan korporasi cenderung terpinggirkan dan kelompok inilah yang menggunakan nilai-nilai adat untuk melakukan resistensi terhadap pemangku keagamaan, korporasi maupun negara. Dimana kondisi tersebut memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi serta menyebabkan ambivalensi fungsi ritual, disatu sisi sebagai perekat sedangkan pada sisi yang lain menjadi pemicu disharmoni antar kelompok masyarakat lokal (adat).

Secara politik ritual *hinting pali* bertransformasi menjadi instrumen hegemoni dan kontra-hegemoni, elite lokal memanfaatkannya untuk memperkuat legitimasi kepemimpinan dan masyarakat lokal (adat) menjadikannya sebagai simbol resistensi. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa ritual adat menjadi arena politik budaya untuk meningkatkan posisi tawar terhadap korporasi, negara dan pemangku keagamaan demi kepentingan sosial, ekonomi maupun identitas. Maka dapat dikatakan secara politik ritual *hinting pali* tidak lagi sekadar ranah tradisi yang sakral, tetapi mengalami pergeseran menjadi instrumen perebutan relasi kuasa dan simbol gerakan solidaritas perlawanan.

Limitasi penelitian ini lebih banyak mengandalkan data kualitatif dengan informan aktor-aktor lokal, sehingga tidak sepenuhnya mewakili seluruh masyarakat. Representasi gender dalam pergeseran pemaknaan ritual juga belum terakomodir yakni kelompok perempuan adat, yang sebenarnya memiliki potensi memberikan pemahaman yang berbeda mengenai makna ritual *hinting pali*. Penelitian ini juga dilakukan dalam jangka waktu terbatas, sehingga hanya mampu menggambarkan pemaknaan pergeseran ritual *hinting pali* secara kurang mendalam dan hanya pada satu periode tertentu saja.

Keterbatasan penelitian tersebut membuka peluang bagi peneliti berikutnya untuk melakukan kajian lanjutan tentang perbandingan antar kelompok masyarakat lokal (adat) di Kalimantan maupun Indonesia dalam rangka memetakan kekhasan gerakan masyarakat lokal (adat). Dengan menggunakan pendekatan interdisipliner yakni menggabungkan antara pendekatan antropologi, politik dan ekonomi politik untuk memperdalam analisis relasi kuasa atas pemaknaan ritual. Serta melakukan pencermatan terhadap peran aktor perempuan dan tokoh muda atas pemaknaan ritual adat sebagai legitimasi dan gerakan perlawanan masyarakat lokal (adat) serta dampaknya dalam konteks modern/global.

Secara teoretis temuan penelitian ini memperkuat teori *indigenous politics* karena praktik adat tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, namun telah bertransformasi menjadi instrumen politik yang bisa diperebutkan dalam relasi kuasa. Temuan ini juga memperkuat konsep hegemoni Gramsci dalam memahami dinamika lokal, dimana dominasi dan resistensi berlangsung tidak hanya melalui kekuatan koersif, tetapi dapat menggunakan simbol-simbol budaya dan adat yang dimaknai ulang (redefinisi) oleh masyarakat lokal (adat). Sedangkan secara praktis hasil penelitian ini penting terhadap perumusan kebijakan daerah khususnya di Kotawaringin Timur. Dimana pemerintah wajib mengakui, mengakomodir peran penting ritual adat dalam memperkuat legitimasi sosial dan politik masyarakat lokal (adat) serta menjadikan nilai-nilai lokal sebagai pertimbangan pembangunan yang secara inklusif.

Maka dapat disimpulkan bahwa ritual *hinting pali* bukan sekadar ritual sakral, tetapi mengalami pergeseran pemaknaan menjadi arena kontestasi politik

budaya/adat yang merepresentasikan pertarungan kepentingan antar kelompok masyarakat lokal. Tujuannya mempertahankan kedaulatan, mendapat pengakuan, menciptakan kemandirian, menjaga keterhubungan dengan alam, hutan, tanah dan lingkungan sebagai tempat penghidupan secara berkelanjutan. Pergeseran makna yang terjadi menggambarkan dinamika relasi kuasa yang kompleks pada tingkat lokal, regional hingga nasional. Dalam kerangka *indigenous politics* dan konsep hegemoni Gramsci ritual *hinting pali* menjadi gambaran bagaimana budaya, adat dan nilai-nilai lokal menjadi sarana hegemonik, kontra-hegemonik.

## 8.2 Saran

Penelitian tentang ritual *hinting pali* ini menunjukkan bahwa ritual adat perlu dipahami tidak hanya secara simbol, kultural dan spiritual, namun harus juga dipahami dalam konteks politik budaya/adat. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan antara teori antropologi, politik dan ekonomi untuk menggambarkan kompleksitas makna ritual. Secara praksis bagi masyarakat adat, lembaga adat, pemerintah, korporasi dan pemangku agama untuk membangun dialog yang setara atas makna ritual. Tujuannya bukan hanya sekadar sebagai instrumen kekuasaan, tetapi menjadi sarana memperkuat solidaritas sosial, menjaga identitas budaya dan melindungi hak masyarakat lokal.

Secara teoritis penelitian ini menegaskan perlunya integrasi antara konsep *indigenous politics* dan teori hegemoni Gramsci dalam memahami praktik adat. Ritual *hinting pali* menunjukkan bahwa ritual adat bukan entitas sakral yang bersifat statis, namun dapat berubah menjadi arena negosiasi makna sebagai ruang hegemoni dan kontra hegemoni berlangsung. Aktor lokal berperan sebagai agen

hegemonik yang membentuk konsensus sesuai kepentingannya, sementara masyarakat lokal (adat) bukan hanya menjadi objek tetapi telah bergeser sebagai subjek aktif dalam politik kultural.

Secara teoritik limitasi penggunaan konsep hegemoni lebih banyak berbicara tentang negara, kelas dan masyarakat sipil dalam konteks Eropa modern. Sementara di Kotawaringin Timur aktor seperti korporasi dan pemuka agama memiliki posisi yang sangat kuat dalam membentuk pemaknaan ritual. Kajian teoritis di masa depan perlu mengombinasikan teori hegemoni dengan kerangka ekonomi-politik global dan kajian agama, agar mampu menangkap kompleksitas relasi kuasa terhadap pemaknaan ritual *hinting pali*. Demikian pula dengan kajian *indigenous politics* perlu lebih peka terhadap dinamika internal masyarakat lokal (adat), termasuk fragmentasi kepentingan dan perubahan kesadaran akibat pengaruh eksternal.

Secara praksis implikasi penelitian ini bagi masyarakat lokal adalah mempertahankan ritual *hinting pali* sebagai simbol identitas kolektif dan memperkuat solidaritas. Dimana ritual tersebut jangan sampai terkooptasi oleh kepentingan eksternal (pemangku keagamaan, korporasi dan negara), masyarakat lokal (adat) perlu membangun kesadaran kritis. Ritual *hinting pali* tidak dimakna secara tunggal sebagai nilai sakral-religius, tetapi menjadi sumber legitimasi politik yang berfungsi untuk melindungi hak-hak masyarakat atas tanah, alam, lingkungan dan hutan. Pendidikan politik berbasis masyarakat lokal sangat perlu dilakukan, tujuannya agar masyarakat lokal (adat) tidak ditempatkan sebagai objek politik pembangunan, tetapi harus bergeser menjadi aktor aktif yang menentukan arah masa depan pembangunan.

Bagi lembaga adat penelitian menekankan pentingnya reposisi peran mereka, dimana lembaga adat sebaiknya tidak sekadar berfungsi sebagai penjaga simbol ritual atau perpanjangan tangan aktor eksternal. Namun harus mampu menjadi mediator dalam menjaga kohesi sosial di tengah fragmentasi internal antar kelompok masyarakat. Lembaga adat harus mampu memperkuat kapasitas kelembagaan, mengelola sumber daya, penyelesaian konflik dan advokasi kebijakan. Tujuannya agar lembaga adat dapat menjadi aktor utama dalam memproduksi wacana hegemonik secara inklusif yakni membangun konsensus sosial yang mampu mengakomodir kepentingan antar kelompok.

Bagi korporasi bahwa penetrasi ekonomi yang mengabaikan nilai-nilai kultural masyarakat hanya akan menimbulkan konflik sosial dan erosi legitimasi. Korporasi perlu mengadopsi pendekatan yang lebih sensitif terhadap budaya lokal dengan tidak memandang ritual *hinting pali* sebagai hambatan, tetapi menjadi mekanisme dialog sosial alternatif untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat lokal (adat). Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebaiknya dirancang dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat. Tujuannya untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara korporasi dengan masyarakat lokal (adat), dimana strategi tersebut diharapkan menempatkan korporasi tidak hanya mendapatkan izin secara formal dari negara. Namun juga mendapatkan “izin dan legitimasi sosial” dari masyarakat lokal (adat) yang terkena dampak langsung atas kehadiran mereka.

Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berbasis kearifan lokal. Pengakuan formal terhadap masyarakat adat dan ritual jangan hanya

berhenti pada level simbolik, misalnya melalui peraturan daerah atau pengakuan seremonial. Pemerintah perlu mengintegrasikan praktik adat seperti ritual *hinting pali* menjadi kebijakan yang berkaitan dengan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam dan resolusi konflik. Pemerintah perlu menciptakan ruang deliberasi yang mempertemukan berbagai aktor seperti masyarakat adat, pemuka agama, korporasi dan birokrat secara berimbang. Maka ritual adat tidak hanya dijadikan sebagai instrumen legitimasi hegemonik semata, tetapi berfungsi menjadi jembatan dalam membangun konsensus sosial secara berkeadilan.

Bagi pemangku keagamaan agar lebih konstruktif dalam menjaga kohesi sosial, karena pemangku keagamaan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap ritual adat. Jika ritual *hinting pali* hanya dimaknai sebagai praktik sinkretis yang bertentangan dengan ajaran agama, maka potensi konflik identitas semakin besar. Tokoh agama perlu mengedepankan pendekatan dialogis agar dapat menempatkan ritual adat menjadi ekspresi identitas kultural yang dapat berdampingan dengan nilai-nilai keagamaan. Maka fungsi pemuka agama dapat menjadi mediator dalam memperkuat solidaritas antar kelompok masyarakat lokal dan menjadi penjaga moralitas publik.

Implikasi praktis dan teoretis dari penelitian ini adalah secara praktis, dapat dipergunakan organisasi masyarakat sipil untuk merumuskan strategi advokasi yang lebih efektif dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat lokal (adat). Sedangkan secara teoretis diharapkan mampu menjadi landasan bagi kajian yang lebih dalam tentang politik relasi kuasa dalam konteks praktik ritual. Kajian lanjutan dapat menggunakan pendekatan interdisipliner dalam mengkaji

bagaimana pemaknaan ritual *hinting pali* terus mengalami pergeseran akibat dari pengaruh kapitalisasi dan globalisasi. Pendekatan komparatif diharapkan mampu menggambarkan secara utuh praktik serupa di wilayah lain di Kalimantan maupun Indonesia untuk menemukan pola umum dan kekhasan lokal dalam konteks hegemoni budaya.

Penelitian selanjutnya juga penting memperhatikan aspek gender dan kaum muda, dimana perempuan adat sering kali memainkan peran sentral dalam praktik ritual. Baik sebagai penjaga pengetahuan lokal (*local wisdom*) maupun aktor lokal yang memiliki peran penting atas pemanfaatan hasil hutan, alam, lingkungan dan tanah untuk kehidupan mereka secara berkelanjutan. Sedangkan kaum muda memiliki pandangan yang berbeda terhadap tradisi di tengah arus modernisasi, pendidikan formal dan globalisasi digital. Pemahaman mereka terhadap ritual *hinting pali* akan sangat menentukan terhadap keberlanjutan ritual tersebut pada masa yang akan datang. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian tentang dinamika lintas generasi dan gender untuk memperkaya analisis dibalik pergeseran pemaknaan ritual adat.

Dengan menempatkan ritual *hinting pali* secara proporsional diharapkan semua aktor dapat membangun konsensus sosial secara lebih adil, inklusif dan berkelanjutan. Sementara itu secara teoritis hasil temuan penelitian ini menggambarkan bahwa praktik adat mengalami pergeseran menjadi instrumen politik budaya/adat yang penuh dengan dinamika hegemoni dan kontra-hegemoni, sehingga harus dikaji dengan kerangka teori yang mampu menangkap kompleksitas tersebut.